PENGUMUMAN
Nomor: 010/KP.01.01/PANSEL/V/2019

TENTANG
SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2019

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2019 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Panitia Seleksi Terbuka Pengisian JPT Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi mengundang para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat untuk mengikuti proses seleksi terbuka pengisian JPT Pratama Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Tahun 2019 dengan ketentuan sebagai berikut:

A. KETENTUAN UMUM

1. **Nama Jabatan**

   Peserta hanya dapat memilih **salah satu** dari 3 (tiga) JPT Pratama Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi yang akan diisi tahun 2019 sebagai berikut:

NO	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	ESELON
1	Direktur Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar	Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu	II.a
2	Direktur Pengembangan Daerah Rawan Pangan	Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu	II.a
3	Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia	Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal	II.a

   Deskripsi kompetensi JPT Pratama tersebut sebagaimana tercantum pada **Lampiran-A** pengumuman ini.

2. **Persyaratan Umum**
   a. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau Diploma IV;
   b. Memiliki pangkat serendah-rendahnya Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b;
   c. Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi/deskripsi Jabatan yang ditetapkan;
   d. Memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;

e. Sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator (Jabatan Struktural Eselon III) atau Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun;
f. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
g. Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada tanggal 30 Oktober 2019; dan
h. Sehat jasmani dan rohani.

3. **Tata Cara Pengajuan Lamaran dan Persyaratan Administrasi**

a. Lamaran tertulis ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dengan alamat: **PANITIA SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI D/A BAGIAN KEPEGAWAIAN, BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM, SEKRETARIAT JENDERAL, JALAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN KALIBATA NOMOR 17 JAKARTA SELATAN, 12750, TELP 021-79198636.**

b. Lamaran sebagaimana dimaksud pada huruf a menggunakan format sebagaimana tersebut pada **Lampiran-B** yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,- dan dilengkapi dokumen administrasi yang disyaratkan sebagai berikut:

1) Fotocopy Ijasah pendidikan yang disyaratkan dan **dilegalisasi** oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menyelenggarakan fungsi kepegawaian pada Kementerian/Lembaga atau Pemprov/Pemkab/Pemkot yang bersangkutan;

2) Daftar Riwayat Hidup yang ditandatangani oleh peserta dan **diketahui** oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menyelenggarakan fungsi kepegawaian pada Kementerian/Lembaga atau Pemprov/Pemkab/Pemkot yang bersangkutan dengan menggunakan format **Lampiran-C**;

3) Fotocopy Keputusan Pengangkatan dalam jabatan terakhir yang **dilegalisasi** oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menyelenggarakan fungsi kepegawaian pada Kementerian/Lembaga atau Pemprov/Pemkab/Pemkot yang bersangkutan;

4) Fotocopy Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang **dilegalisasi** oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menyelenggarakan fungsi kepegawaian pada Kementerian/Lembaga atau Pemprov/Pemkab/Pemkot yang bersangkutan;

5) Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja Pegawai tahun 2017 dan tahun 2018 yang **dilegalisasi** oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menyelenggarakan fungsi kepegawaian pada Kementerian/Lembaga atau Pemprov/Pemkab/Pemkot yang bersangkutan;

6) Pernyataan dari Atasan Langsung bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat, bermaterai Rp.6.000,- yang **diketahui** oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menyelenggarakan fungsi kepegawaian pada Kementerian/Lembaga atau Pemprov/Pemkab/Pemkot yang bersangkutan dengan menggunakan format **Lampiran-D;**

7) Pernyataan dari peserta bahwa tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik, bermaterai Rp.6.000,- yang **diketahui** oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menyelenggarakan fungsi kepegawaian pada Kementerian/ Lembaga atau Pemprov/ Pemkab/ Pemkot yang bersangkutan dengan menggunakan format **Lampiran-E**;

8) Fotocopy bukti penyerahan LHKPN terakhir bagi wajib lapor LHKPN atau LHKASN yang **dilegalisasi** oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menyelenggarakan fungsi kepegawaian pada Kementerian/Lembaga atau Pemprov/Pemkab/Pemkot yang bersangkutan;

9) Fotocopy bukti penyerahan SPT tahun 2018 bagi wajib pajak yang **dilegalisasi** oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menyelenggarakan fungsi kepegawaian pada Kementerian/ Lembaga atau Pemprov/ Pemkab/ Pemkot yang bersangkutan;

10) Persetujuan dari **Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)** atau **Pejabat yang Diberi Delegasi Wewenang oleh PPK** untuk mengikuti proses seleksi terbuka pengisian JPT Pratama Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dengan menggunakan format sebagaimana tersebut pada **Lampiran-F**;

Catatan:

- *yang dimaksud dengan PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- *yang dimaksud dengan Pejabat yang Diberikan Delegasi Wewenang oleh PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

11) Pas foto **terbaru** berwarna dengan latar belakang putih, ukuran 4R, sebanyak 8 (delapan) lembar.

c. Lamaran beserta dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dimasukkan ke dalam 1 (satu) amplop tertutup dan **sudah diterima** oleh Panitia Seleksi paling lambat hari **Selasa**, **18 Juni 2019 pukul 16.00 WIB**;

d. Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, **sepenuhnya menjadi milik Panitia Seleksi dan tidak dapat diminta kembali**.

B. KETENTUAN KHUSUS

1. Lamaran yang diproses hanya lamaran beserta **dokumen administrasi yang lengkap** sesuai yang disyaratkan dan **tidak diperkenankan mengganti atau menambah atau mengurangi dokumen yang telah diterima oleh Panitia Seleksi**;
2. Dalam proses seleksi tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun;

3. Seluruh biaya akomodasi, transportasi, kelengkapan administrasi, dan biaya pribadi yang dikeluarkan oleh peserta selama proses seleksi ditanggung oleh peserta;
4. Keputusan Panitia Seleksi **bersifat final** dan **tidak dapat diganggu gugat**;
5. Apabila di kemudian hari diketahui pelamar memberikan data/keterangan tidak benar, Panitia Seleksi **berhak membatalkan hasil seleksi**.

C. TAHAPAN SELEKSI

1. Seleksi Terbuka Pengisian JPT Pratama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
   a. Seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas.
      1) Seleksi administrasi dilaksanakan melalui penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen administrasi yang disyaratkan.
      2) Hasil seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) diumumkan secara resmi melalui papan pengumuman resmi dan ***website*** Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan alamat ***http://www.kemendesa.go.id***.
      3) Bagi peserta yang dinyatakan memenuhi syarat dalam Seleksi Administrasi dan penelusuran rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Teknis.
   b. Seleksi Kompeensi.
      1) Seleksi Kompetensi terdiri atas Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural.
      2) Seleksi Kompetensi Teknis dilaksanakan melalui:
         a) penyusunan makalah berkenaan dengan jabatan yang dipilih, **menggunakan perangkat komputer** yang disediakan oleh Panita Seleksi, bertempat di ruangan dan waktu yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi;
         b) pembuatan bahan paparan (presentasi) dalam bentuk *powerpoint* berkenaan dengan makalah yang disusun bertempat ruangan dan waktu yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi;
         c) penilaian makalah dan bahan paparan oleh Panitia Seleksi;
         d) hasil seleksi Kompetensi Teknis untuk penilaian makalah dan bahan paparan diumumkan melalui papan pengumuman resmi dan *website* Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan alamat ***http://www.kemendesa.go.id***
      3) 4 (empat) peserta dengan urutan peringkat nilai terbaik selanjutnya mengikuti:
         a) Seleksi Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural; dan
         b) Tes Kesehatan dan Tes Kejiwaan.

4) Seleksi Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf a) dilaksanakan oleh Lembaga Asesmen Independen yang ditunjuk.
5) Tes Kesehatan dan Tes Kejiwaan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf b) dilaksanakan di Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk Panitia Seleksi.
6) Tempat dan waktu seleksi Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural serta Tes Kesehatan dan Tes Kejiwaan akan ditentukan oleh Panitia Seleksi.

c. Wawancara Akhir.

Peserta yang telah mengikuti seleksi kompetensi serta tes kesehatan dan tes kejiwaan harus **mengikuti wawancara akhir** yang dilakukan oleh Panitia Seleksi.

2. Hasil akhir dari seleksi terbuka pengisian JPT Pratama Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi tahun 2019 adalah 3 (tiga) peserta dengan urutan peringkat nilai terbaik untuk setiap jabatan, yang diumumkan berdasarkan urutan abjad melalui papan pengumuman resmi dan *website* Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dengan alamat ***http://www.kemendesa.go.id***

D. JADWAL WAKTU PELAKSANAAN

NO	KEGIATAN		TANGGAL	KETERANGAN
1	Pengumuman pendaftaran		Senin, 20 Mei s/d Selasa, 18 Juni 2019	Diumumkan melalui papan pengumuman resmi dan website **http://www.kemendesa.go.id**
2	Pendaftaran dan Penerimaan Berkas lamaran		Selasa, 21 Mei s/d Selasa, 18 Juni 2019	Sekretariat Panitia Seleksi
3	Seleksi Administrasi dan penelusuran rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas		Rabu, 19 Juni s/d Jumat, 21 Juni 2019	Panitia Seleksi
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi dan penelusuran rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas		Senin, 24 Juni 2019	Diumumkan melalui papan pengumuman resmi dan website http://www.kemendesa.go.id
5	Seleksi Kompetensi Teknis			
	a.	Penulisan makalah dan penyiapan bahan paparan	Rabu, 26 Juni 2019	Sekretariat Panitia Seleksi
	b.	Penilaian makalah	Kamis, 27 Juni s/d Jumat, 28 Juni 2019	Panitia Seleksi

NO	KEGIATAN	TANGGAL	KETERANGAN
6	Pengumuman hasil seleksi Kompetensi Teknis untuk penilaian makalah	Senin, 1 Juli 2019	Diumumkan melalui papan pengumuman resmi dan website http://www.kemendesa.go.id
7	Seleksi Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural	Rabu, 3 Juli 2019	Lembaga Asesmen Independen
8	Tes kesehatan dan tes kejiwaan	Jumat, 5 Juli 2019	Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh Panitia Seleksi
9	Wawancara Akhir	Senin, 8 Juli 2019	Panitia Seleksi
10	Pengumuman hasil akhir seleksi	Selasa, 9 Juli 2019	Diumumkan melalui papan pengumuman resmi dan website http://www.kemendesa.go.id

E. KETENTUAN LAIN

1. Jadwal waktu pelaksanaan dan ketentuan lain **sewaktu-waktu dapat berubah**.
2. Jika terjadi perubahan jadwal waktu pelaksanaan dan ketentuan lain akan diumumkan melalui papan pengumuman resmi serta website ***http://www.kemendesa.go.id***
3. Peserta diharapkan untuk selalu memantau perkembangan pelaksanaan seleksi terbuka pengisian JPT Pratama Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi melalui *website* ***http://www.kemendesa.go.id***
4. Dalam hal membutuhkan penjelasan teknis administratif berkenaan dengan dokumen lamaran dapat menghubungi Sekretariat Panitia Seleksi pada hari dan jam kerja d/a Bagian Kepegawaian, Biro Sumber Daya Manusia dan Umum, Sekretariat Jenderal, Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan, 12750, Telp. 021-79198636.

Jakarta, 20 Mei 2019
Ketua Panitia Seleksi

PANSEL

ANWAR SANUSI, Ph.D

LAMPIRAN A

DESKRIPSI KOMPETENSI
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

1	NAMA JABATAN	:	Direktur Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar, Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu
	TUGAS	:	Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah pulau kecil dan terluar wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua
	PERSYARATAN KOMPETENSI TEKNIS	:	1. Mampu menjelaskan makna tugas dan fungsi Direktorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar dalam memberikan dukungan terhadap pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu. 2. Mampu menjelaskan kerangka strategi untuk merumuskan alternatif kebijakan pengembangan daerah pulau kecil dan terluar dalam rangka mencapai sasaran kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu. 3. Mampu menjelaskan kerangka sikap dan langkah-langkah untuk mengintegrasikan UKE 3 di lingkungan Direktorat Pengembangan Daerah Daerah Pulau Kecil dan Terluar bagi tercapainya hasil Direktorat selaras dengan tujuan Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu. 4. Mampu menjelaskan kerangka strategi untuk meyakinkan Unit Kerja Internal Kementerian dan K/L/D/M agar bersedia mengimplementasikan kebijakan pengembangan daerah pulau kecil dan terluar dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal. 5. Mampu menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan demi terwujudnya sinergi pengembangan daerah pulau kecil dan terluar antar Unit Kerja di lingkungan Kementerian, dan antar K/L/D/M dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal.

2	NAMA JABATAN	:	Direktur Pengembangan Daerah Rawan Pangan, Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu
	TUGAS	:	Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan daerah rawan pangan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
	PERSYARATAN KOMPETENSI TEKNIS	:	1. Mampu menjelaskan makna tugas dan fungsi Direktorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan dalam memberikan dukungan terhadap pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu. 2. Mampu menjelaskan kerangka strategi untuk merumuskan alternatif kebijakan pengembangan daerah rawan pangan dalam rangka mencapai sasaran kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu. 3. Mampu menjelaskan kerangka sikap dan langkah-langkah untuk mengintegrasikan UKE 3 di lingkungan Direktorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan bagi tercapainya hasil Direktorat selaras dengan tujuan Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu. 4. Mampu menjelaskan kerangka strategi untuk meyakinkan Unit Kerja Internal Kementerian dan K/L/D/M agar bersedia mengimplementasikan kebijakan pengembangan daerah rawan pangan dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal. 5. Mampu menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan demi terwujudnya sinergi pengembangan daerah rawan pangan antar Unit Kerja di lingkungan Kementerian, dan antar K/L/D/M dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal.

3	NAMA JABATAN	:	Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal
	TUGAS	:	Melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, keterampilan, tenaga kerja, serta inovasi dan penerapan teknologi.
	PERSYARATAN KOMPETENSI TEKNIS	:	1. Mampu menjelaskan makna tugas dan fungsi Direktorat Pengembangan SDM dalam memberikan dukungan terhadap pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal. 2. Mampu menjelaskan kerangka strategi untuk merumuskan alternatif kebijakan pengembangan SDM daerah tertinggal dalam rangka mencapai sasaran kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal. 3. Mampu menjelaskan kerangka sikap dan langkah-langkah untuk mengintegrasikan UKE 3 di lingkungan Direktorat Pengembangan SDM bagi tercapainya hasil Direktorat selaras dengan tujuan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal. 4. Mampu menjelaskan kerangka strategi untuk meyakinkan Unit Kerja Internal Kementerian dan K/L/D/M agar bersedia mengimplementasikan kebijakan pengembangan SDM daerah tertinggal dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal. 5. Mampu menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan demi terwujudnya sinergi pengembangan SDM daerah tertinggal antar Unit Kerja di lingkungan Kementerian, dan antar K/L/D/M dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal.

PERSYARATAN KOMPETENSI MANAJERIAL JPT PRATAMA	:	1. Integritas: Mampu menciptakan situasi kerja yang mendorong kepatuhan pada nilai, norma, dan etika organisasi. 2. Kerjasama: Membangun komitmen tim, sinergi. 3. Komunikasi: Mampu mengemukakan pemikiran multidimensi secara lisan dan tertulis untuk mendorong kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. 4. Orientasi pada hasil: Mendorong unit kerja mencapai target yang ditetapkan atau melebihi hasil kerja sebelumnya. 5. Pelayanan Publik: Mampu memonitor, mengevaluasi, memperhitungkan dan mengantisipasi dampak dari isu- isu jangka panjang, kesempatan, atau kekuatan politik dalam hal pelayanan kebutuhan pemangku kepentingan yang transparan, objektif, dan professional. 6. Pengembangan diri dan orang lain: Menyusun program pengembangan jangka panjang dalam rangka mendorong manajemen pembelajaran. 7. Mengelola Perubahan: Memimpin perubahan pada unit kerja. 8. Pengambilan Keputusan: Menyelesaikan masalah yang mengandung risiko tinggi, mengantisipasi dampak keputusan, membuat tindakan pengamanan; mitigasi risiko.
PERSYARATAN KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL JPT PRATAMA		Perekat Bangsa: Mendayagunakan perbedaan secara konstruktif dan kreatif untuk meningkatkan efektifitas organisasi.

LAMPIRAN-B

FORMAT LAMARAN

Jakarta, 2019

Kepada Yth.
Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

d/a Biro Sumber Daya Manusia dan Umum, Sekretariat Jenderal
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Nomor 17, Jakarta Selatan
di
Jakarta

Sehubungan dengan Pengumuman Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor: **010/KP.01.01/PANSEL/V/2019**, saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama	:	.....
NIP	:	.....
Pangkat/Gol.Ruang	:	.....
Jabatan	:	.....
Unit Kerja/Instansi	:	.....

Mengajukan diri untuk mengikuti proses Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan pilihan jabatan**.....*)**

Atas pengajuan diri dalam proses seleksi ini saya menyatakan bahwa saya bersedia mengikuti seluruh proses dan ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi. Sebagai kelengkapan, terlampir saya sampaikan dokumen persyaratan yang ditentukan. Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Hormat saya,

(materai 6.000)

..... (nama)
.....(NIP)

Keterangan
*) *diisi nama jabatan yang dipilih*

LAMPIRAN-C

FORMULIR DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI

1	Nama Lengkap		:	
2	NIP		:	
3	Nomor Induk Kependudukan (NIK)		:	
4	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)		:	
5	Pangkat dan Golongan Ruang		:	
6	Tempat dan Tanggal Lahir		:	
7	Nomor Telephone		:	
8	Jenis Kelamin		:	
9	Agama		:	
10	Status Perkawinan		:	
11	Alamat rumah			
	a	Jalan	:	
	b	RT/RW	:	
	c	Kelurahan/Desa	:	
	d	Kecamatan	:	
	e	Kabupaten/Kota	:	
	f	Provinsi	:	
	g	Nomor telpon rumah	:	
	h	Nomor telpon genggam	:	
	e	Email	:	
12	Keterangan fisik			
	a	Tinggi badan (Cm)	:	
	b	Berat badan (Kg)	:	
	c	Rambut	:	
	d	Bentuk muka	:	
	e	Warna kulit	:	
	f	Ciri khas	:	
	g	Cacat tubuh	:	
13	Kegemaran (hobby)		:	

II. DATA KELUARGA

NO	HUBUNGAN KELUARGA	NAMA LENGKAP	TEMPAT/ TGL LAHIR	NIK	TEMPAT TINGGAL
1	Isteri				
2	Anak ke-1				
3	Anak ke-2				
4	Anak ke-3				
5	Anak ke-4				

III. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Pendidikan Formal

NO	JENJANG	NAMA LEMBAGA PENDIDIKAN	JURUSAN	TAHUN KE-LULUSAN	LOKASI PENDI-DIKAN	NAMA KEPALA SEKOLAH/ REKTOR/ DIREKTUR

2. Diklat Kedinasan

a. Diklat Teknis

NO	NAMA DIKLAT	WAKTU PELAKSANAAN*)	NOMOR TANDA KELULUSAN/STTB	LOKASI DIKLAT	PENYELENGGARA DIKLAT

***)** *Dari tanggal, bulan, tahun sampai dengan tanggal, bulan, tahun*

b. Diklat Kepemimpinan

NO	NAMA DIKLAT	WAKTU PELAKSANAAN*)	NOMOR TANDA KELULUSAN/STTB	LOKASI DIKLAT	PENYELENGGARA DIKLAT

***)** *Dari tanggal, bulan, tahun sampai dengan tanggal, bulan, tahun*

IV. RIWAYAT PEKERJAAN

a. Riwayat Kepangkatan

NO	PANGKAT	GOL/RUANG	TMT	SURAT KEPUTUSAN		
				PEJABAT	NOMOR	TANGGAL

b. Riwayat jabatan/penugasan

NO	JABATAN/PENUGASAN	JANGKA WAKTU*)	SURAT KEPUTUSAN		
			PEJABAT	NOMOR	TANGGAL

) *Dari tanggal, bulan, tahun sampai dengan tanggal, bulan, tahun*

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia menanggung resiko yang diakibatkan olehnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 2019

…… (nama)
…… (NIP**)**

MENGETAHUI
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menyelenggarakan fungsi kepegawaian pada Kementerian/Lembaga atau Pemprov/Pemkab/Pemkot

…… (nama)
…… (NIP)

LAMPIRAN-D
FORMAT PERNYATAAN TIDAK MENJALANI HUKUMAN

SURAT PERNYATAAN ATASAN LANGSUNG
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
Nomor : 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat/Gol. Ruang : .....

Jabatan : .....

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

Nama : .....

NIP/NRP : .....

Pangkat/Gol. Ruang : .....

Jabatan : .....

tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan/atau hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari ternyata isi Surat Pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menanggung resiko yang diakibatkan olehnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 2019

.....
.....*)

(Materai 6000)

..... (nama)
..... (NIP)

*) *Nama Jabatan Atasan Langsung*

Mengetahui

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menyelenggarakan fungsi kepegawaian pada Kementerian/Lembaga atau Pemprov/Pemkab/Pemkot

.....(nama)

.....(NIP)

LAMPIRAN-E

FORMAT PERNYATAAN TIDAK BERAFILIASI DENGAN PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN

TIDAK BERAFILIASI DENGAN PARTAI POLITIK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat/Gol. Ruang : .....

Jabatan : .....

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak memiliki afiliasi dengan partai politik.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari ternyata isi pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menanggung resiko yang diakibatkan olehnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta,..... 2019

.....
.....

(materai 6000)

..... (nama)
..... (NIP)

MENGETAHUI
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menyelenggarakan fungsi kepegawaian pada Kementerian/Lembaga atau Pemprov/Pemkab/Pemkot

..... (nama)
..... (NIP)

LAMPIRAN-F

PERSETUJUAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN

PERSETUJUAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN/
PEJABAT YANG BERWENANG*)
Nomor : ...../2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Jabatan : .....

selaku Pejabat Pembina Kepegawaian atas:

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat/Gol.Ruang : .....

Jabatan : .....

dengan ini memberikan persetujuan untuk mengikuti proses Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pengumuman Panitia Seleksi Nomor: 010/KP.01.01/PANSEL/V/2019

Jakarta,.....2019

.....
.....**)

..... (nama)
..... (NIP)

) Pilih salah satu

****) Nama Pejabat Pembina Kepegawaian atau PyB yang diberikan kewenangan.***